

Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi

Mohamad Ikhsan Modjo¹
BINUS University Indonesia

Abstraksi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Walau *economic shock* yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 berangsur mereda seiring stabilnya pasar keuangan domestik dan menggeliatnya beberapa sektor perekonomian. Akan tetapi mengingat sifatnya yang memukul baik sisi penawaran mau pun permintaan dari perekonomian, upaya pemulihan masih memerlukan lebih banyak waktu. Pada saat yang sama, penyebaran virus juga belum menunjukkan tanda-tanda berakhir seiring dengan masih meningkatnya tren kasus dan kematian terkonfirmasi. Di satu sisi, tuntutan untuk memulai kembali berbagai aktivitas sosial dan ekonomi semakin menguat ditandai dengan dilonggarkannya pembatasan sosial di banyak daerah. Di sisi lain, infrastruktur kesehatan publik yang ada masih belum memadai. Sehingga terdapat risiko yang tinggi untuk menggerakkan kembali berbagai roda aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Dengan berbagai keterbatasan ini, *new normal* menjadi satu keharusan. *New normal* juga merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan penguatan ekonomi asalkan diiringi penyusunan prioritas yang transparan serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang tepat.

Kata Kunci: covid-19, perekonomian, pembatasan sosial, new normal

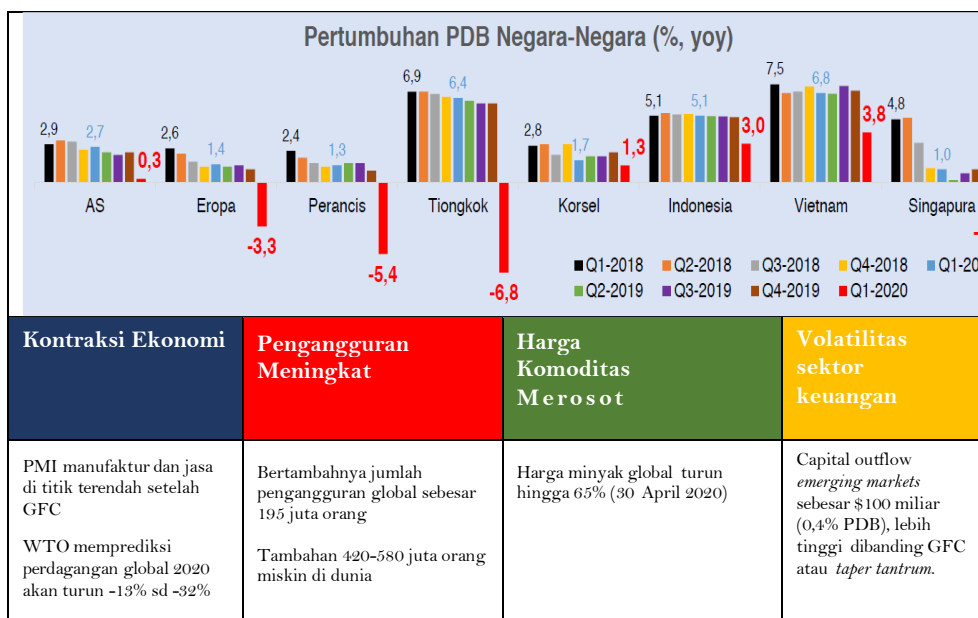
¹ Mohamad Ikhsan Modjo adalah Staf Pengajar tetap di Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Universitas BINA Nusantara Indonesia. Email: mohamad.modjo@binus.edu.

Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi

Mohamad Ikhsan Modjo

I. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 adalah ujian ketahanan suatu bangsa. Mengutip Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, Pandemi Covid-19 adalah *acid test* (uji kelaikan cepat) bagi ketahanan kesehatan publik, modal sosial serta sistem tata kelola pemerintahan². Krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 ini datang begitu cepat dan menguak kerapuhan yang dimiliki suatu negara di berbagai bidang. Di bidang kesehatan, pandemik ini misalnya menunjukkan betapa tidak mencukupi dan meratanya fasilitas kesehatan di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Italia yang tadinya dianggap cukup maju dalam fasilitas kesehatan publik. Bukan hanya dalam hal ketersediaan rumah sakit dan tenaga medis, krisis ini juga membuka fakta dari minim dan tidak meratanya fasilitas di bidang laboratorium kesehatan, pengetesan dan vaksinasi di banyak negara.



Gambar 1. Dampak Global Pandemi Covid-19

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), April 2020.

Di bidang ekonomi, krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 telah berkembang sedemikian rupa dan menyebabkan kontraksi perekonomian global. Tidak seperti krisis-krisis sebelumnya, ia memukul bukan hanya sisi permintaan dari perekonomian, namun juga sisi penawaran perekonomian. Sehingga daya tekannya terhadap pertumbuhan menjadi sangat dirasakan di banyak negara. Berbagai badan keuangan dunia memperkirakan pandemi Covid-19 akan menyebabkan kontraksi perekonomian dunia sebesar -2,0% sampai 2,8% pada 2020, dari sebelumnya tumbuh sebesar rata-rata 2,9% pada

² Balakrishnan (2020), the impact of COVID-19 on Singapore, our region, and the world, Interview with CNBC Asia, CNBC Exclusive, 11 March 2020.

2019. Pada saat yang sama, pandemi Covid-19 diperkirakan juga akan mengurangi arus perdagangan dan investasi global hingga 30%, serta menambah volatilitas pasar keuangan dunia hingga 215%. Berkurang drastisnya berbagai aktivitas perekonomian global pada gilirannya diperkirakan akan mengakibatkan tidak kurang 195 juta orang akan mengalami kehilangan pekerjaan dan antara 420 sampai 580 juta orang jatuh pada jurang kemiskinan (Gambar 1).

Begitu juga di bidang sosial, pandemi yang terjadi bukan hanya memperuncing pertentangan, namun juga terbukti bisa memicu konflik sosial di suatu negara. Terutama negara di mana terdapat benih diskriminasi dan ketimpangan sosial dan politik yang tajam, yang menjadi rentan terhadap konflik dan benturan antar kelas sosial di masyarakat. Kerusakan sosial yang berlarut-larut yang terjadi di Amerika Serikat merupakan satu bukti. Kerusakan ini, meski dibingkai oleh persoalan rasial, tapi sejatinya juga dipicu oleh krisis ekonomi akibat ledakan pengangguran lebih dari 33 juta orang serta ratusan ribu korban jiwa akibat pandemi Covid-19 di negara tersebut.³

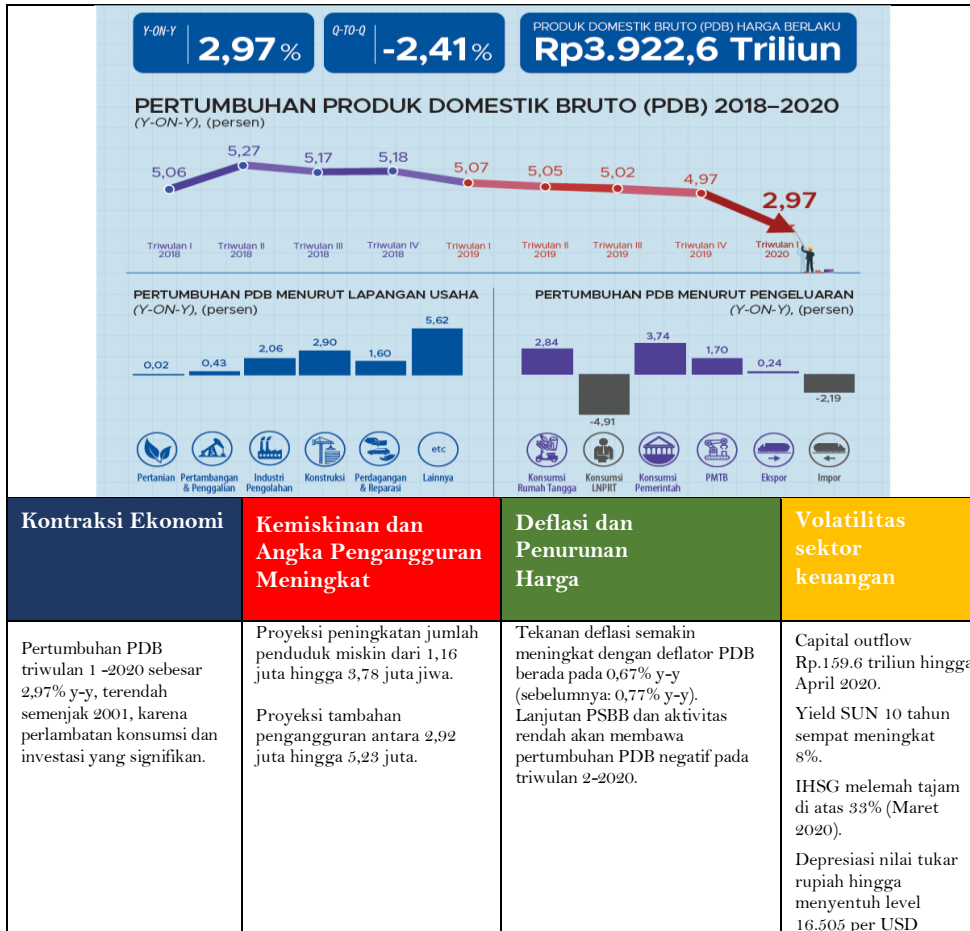
Tulisan ringkas ini akan menelusuri ramifikasi serta dampak pandemi Covid-19 di Indonesia dengan mengulas berbagai aspek ekonomi pembangunan, kesehatan publik serta kesiapan regional. Artikel ini juga akan mengulas beberapa prioritas menuju sebuah *new normal* atau “hidup dengan damai” dengan Covid-19 yang mesti diambil dan dipersiapkan. Artikel ini kemudian akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk bukan hanya untuk pulih tapi juga keluar dari krisis akibat Pandemi ini secara lebih kuat dan tumbuh berkelanjutan.

II. Covid-19 dan Ekonomi Indonesia

Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia yang diakibatkan pandemi Covid-19. Berbagai badan ekonomi internasional seperti Bank Dunia memperkirakan pandemi ini akan mengikis pertumbuhan ekonomi nasional hingga hanya berada pada kisaran -3,5% sampai dengan 2,1% pada 2020. Senada dengan Bank Dunia, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5% pada 2020. Hal ini jelas merupakan sebuah koreksi tajam dari tingkat pertumbuhan sebesar 5,02% yang tercatat pada 2019. Demikian pula Sementara dari sisi sosial ekonomi, beberapa lembaga memperkirakan akan terjadi tambahan antara 1,16 juta (+0,44%) hingga 9,6 juta (+3,6%) penduduk miskin pada 2020, yang tergantung pada derajat kerusakan ekonomi yang akan terjadi. Begitu juga, jumlah penganggur diperkirakan akan bertambah sebesar 2,91 juta (2,17% angkatan kerja) hingga 5,23 juta (3,79% angkatan kerja) pada 2020.⁴

³ Cheung (2020), Coronavirus: US unemployment claims hit 33.3 million amid virus, BBC News Services, 7 May 2020. <http://shorturl.at/xJXZ2>

⁴ Indonesia (2020), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), April 2020.



Gambar 2. Dampak Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19 di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia (Diolah)

Pasar keuangan domestik pun tak luput dari guncangan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari derasnya arus modal keluar yang tercatat mencapai sebesar Rp.159,6 triliun antara Januari sampai April 2020. Jumlah *capital outflow* dalam rentang waktu singkat ini merupakan yang terbesar yang pernah dialami Indonesia semenjak 2009. Di waktu yang sama, volatilitas keuangan domestik juga tercatat meningkat yang ditandai dengan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di atas 33% pada Maret 2020, dan terdepresiasi nilai rupiah hingga menyentuh level Rp.16.505 per USD, meski saat ini sudah menurun di level Rp.15.000 per USD. Imbal hasil (*Yield*) obligasi pemerintah Republik Indonesia dengan tenor 10 tahun juga sempat meningkat ke level di atas 8% pada Maret 2020.

Dari rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1-2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jelas terlihat kerusakan pada perekonomian yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan-1 2020 tercatat hanya sebesar 2,97% (*year-on-year*) yang merupakan angka pertumbuhan terendah sejak 2001. Angka ini juga jauh lebih rendah dari prediksi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, yang sebelumnya masih memperkirakan pertumbuhan di kisaran 4%-5% pada triwulan-1 2020. Ada pun ekonomi Indonesia triwulan

1-2020 terhadap triwulan 4-2019 sudah tercatat mengalami kontraksi sebesar -2.41%⁵. Dengan kata lain, sudah terjadi penurunan besaran kue ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Walau belum bisa dikatakan sebagai resesi (*technical recession*), yang per definisi adalah penurunan besaran PDB selama dua triwulan berturut-turut, penurunan ini bisa dipastikan berlanjut pada triwulan 2-2020 mengingat puncak pembatasan sosial terjadi pada bulan April dan Mei 2020, yang baru akan terekam dalam data triwulan 2-2020.

Dari sisi pengeluaran, kontraksi PDB terbesar tercatat pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang memburuk sebesar 2,84 %, merupakan kontraksi konsumsi terbesar semenjak 1999. Penurunan tajam pada belanja rumah tangga konsumen setidaknya disebabkan dua hal: Pertama, meningkatnya jumlah pengangguran yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan dus belanja konsumsi rumah tangga. Kedua, peningkatan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 menyebabkan dialihkannya konsumsi pada tabungan (*precautionary savings*) oleh rumah tangga yang pendapatannya belum terlalu terdampak dari krisis akibat pandemi ini.

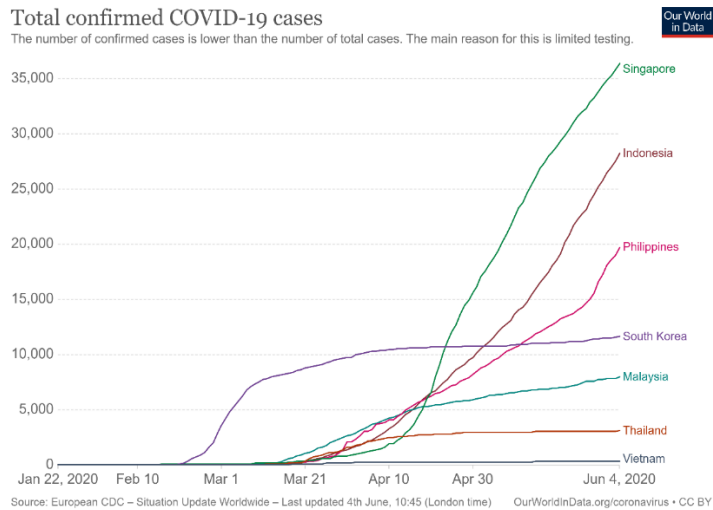
Sudah barang tentu, tidak semua sektor dalam perekonomian memiliki heterogenitas dampak. Beberapa sektor yang terpuak sangat kuat adalah sektor transportasi (1,27% dari sebelumnya 7,55%), sektor konstruksi (-2,41%), serta industri pengolahan (-1,47%). Pukulan berat yang dirasakan berbagai sektor ini sejatinya bisa diperkirakan sebelumnya dari berbagai indikator lain, misalnya dari indikator penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing yang mencapai 64,11% antara Maret 2019 dan Maret 2020, serta Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia pada bulan April 2020 yang tercatat sebesar 27,5 yang merupakan angka terendah sepanjang sejarah⁶. Sementara sektor lain yang masih relatif aman adalah sektor keuangan, sektor kesehatan dan pekerjaan sosial yang masih tumbuh dominan sebesar 10.67% y-y (sebelumnya: 8,49% y-y), dan 10,39% y-y (sebelumnya: 7.82 y-y), berturut-turut.

III. Kapan dan Bagaimana Pandemi Akan Berakhir?

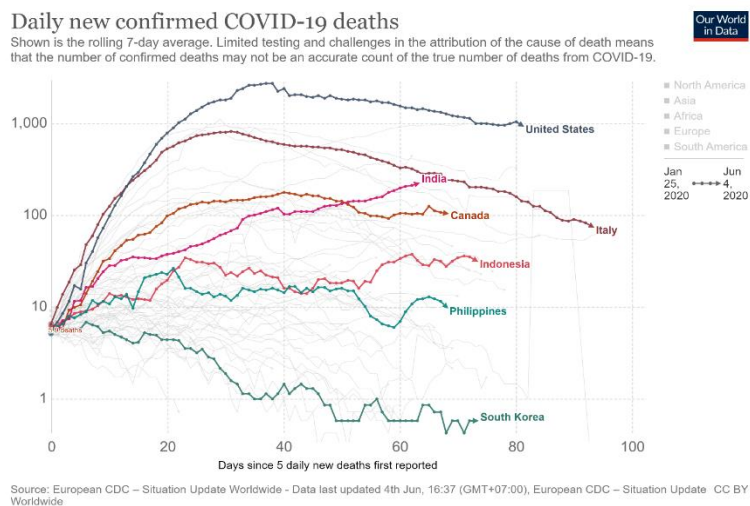
Kerusakan hampir merata di berbagai sektor yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 pada dasarnya disebabkan oleh sifat ketidakpastian (*uncertainty*) dan risiko fatal yang diakibatkannya. Di mana selama belum dilakukannya tes secara masif dan ditemukannya vaksin yang efektif, yang merupakan penyebab adanya *asymmetric information*, maka segala aktivitas dan kegiatan sosial akan dilingkupi ketidakpastian dan memiliki risiko. Risiko ini di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Data terakhir hingga 4 Juni 2020 menunjukkan baik jumlah kasus dan kematian terkonfirmasi akibat Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Bahkan untuk jumlah kasus terkonfirmasi, Indonesia termasuk tertinggi di kawasan Asia Tenggara, di posisi kedua teratas setelah Singapura.

⁵ BPS (2020), Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020, 5 Mei 2020.

⁶ Warjiyo (2020), Koordinasi Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, 28 Mei 2020.



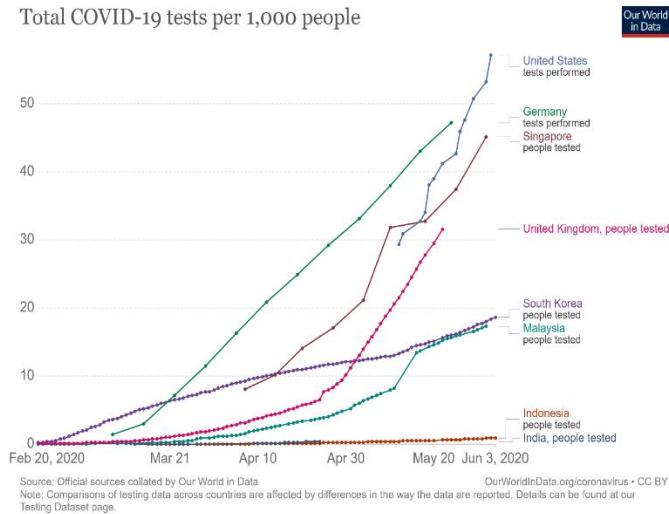
Gambar 3. Total Kasus Terkonfirmasi akibat Covid-19 Beberapa Negara
Sumber: OurWorldinData.org (2020).



Gambar 4. Total Kematian Terkonfirmasi akibat Covid-19
Sumber: OurWorldinData.org (2020).

Dalam hal ini, faktor risiko dan ketidakpastian bisa diminimalisir dengan melakukan serangkaian 3t (*testing, tracing, serta treatment*) pada mereka yang diduga menderita Covid-19. Sayang dalam tiga hal ini, Indonesia masih sangat tertinggal. Misalnya dalam melakukan tes, Gambar 5 menunjukkan jumlah tes Covid-19 per 1,000 penduduk yang dilakukan Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lain, bahkan dibandingkan negara tetangga di Asia. Satu hal yang tentu saja jauh dari ideal, di mana seharusnya dengan jumlah kematian terkonfirmasi yang relatif tinggi, Indonesia harus melakukan lebih banyak lagi tes kepada mereka yang diduga menderita Covid-19. Ke depan hal ini tentu saja merupakan satu prioritas untuk pembenahan mengingat episentrum krisis multidimensi yang diakibatkan

pandemi Covid-19 berakar dan bermula dari goyahnya ketahanan kesehatan publik di suatu negara.



Gambar 5. Jumlah Tes Covid-19 per 1000 Orang dan Jumlah Kasus
Sumber: OurWorldinData.org (2020).

Dengan sederet kerusakan yang ditimbulkan pada berbagai sektor, pertanyaan yang muncul kemudian kapankah Pandemi Covid-19 ini akan berakhir? Dari sejarah pandemi yang terjadi di dunia, ia akan berakhir untuk dua alasan: alasan medis dan alasan sosial. Satu pandemi berakhir karena alasan medis dengan ditemukannya vaksinasi yang bisa memberikan kekebalan untuk melawan virus ini atau cara menghindarinya yang efektif. Sementara secara sosial, pandemi akan berakhir bila masyarakat sudah mencapai satu tahap di mana kelelahan terhadap rasa ketakutan yang disebabkan pandemi sudah terjadi sehingga diputuskan untuk kemudian beradaptasi dengan hidup bersama risiko yang ada⁷.

Dewasa ini telah ada puluhan bahkan ratusan upaya yang dilakukan berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk menemukan vaksin yang bisa memberikan perlindungan terhadap Covid-19. Estimasi teroptimis adalah bahwa vaksin yang telah diuji secara laboratorium dan klinis akan mulai tersedia pada awal 2021⁸. Namun persoalan lain yang kemudian akan muncul adalah bagaimana memproduksi dan mendistribusikannya secara massal kepada hampir 8 miliar penduduk di dunia. Persoalan selanjutnya adalah masalah etik, seperti negara mana dan golongan masyarakat mana yang berhak mendapatkannya terlebih dahulu? Lebih lanjut pertanyaan lain adalah apakah vaksin ini tergolong barang publik, yang artinya tanggung jawab pengadaan dan distribusinya ada pada negara. Beberapa hal yang tentu saja tidak mudah untuk dijawab.

Di samping itu, bila kita kembali lagi ke sejarah, optimisme ditemukan dan didistribusikannya vaksin untuk menangkal Covid-19 nampaknya juga harus dikalibrasi ulang. Rekam jejak pertentangan antar virus dan kemampuan inovasi medis yang ada menunjukkan bahwa mayoritas dari pandemi berakhir lebih banyak bukan karena alasan

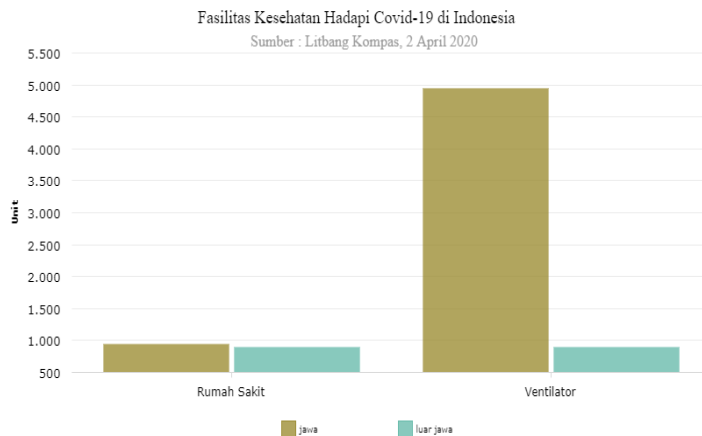
⁷ Kolata (2020), How Pandemics End, New York Times, 10 May 2020.

⁸ Christensen (2020), US should have a 'couple hundred million' doses of a Covid-19 vaccine by the start of 2021, Fauci says, CNN World, 3 June 2020.

medis, dengan ditemukannya vaksin, Akan tetapi mayoritas berakhir karena satu kesepakatan sosial. Satu artikel yang dipublikasi belum lama oleh Gina Kolata, jurnalis sains finalis penghargaan Pulitzer dari Amerika, menggambarkan bagaimana pandemi besar yang menewaskan ratusan ribu sampai jutaan manusia seperti Bubonic Plaque (Black Death), Flu Spanyol 1918, dan Hong Kong Flu 1968 berakhir secara sosial seiring dengan berlalunya waktu, tanpa pernah ditemukan vaksin yang efektif untuk menangkalnya bahwa sampai saat ini⁹. Virus yang menyebabkan pandemi Flu Hong Kong 1968 bahkan masih bersirkulasi sampai saat ini di dunia sebagai penyakit flu musiman, yang belum ditemukan vaksin yang benar-benar efektif untuk menangkalnya. Namun secara sosial, manusia telah mampu beradaptasi dan tidak memiliki ketakutan yang berlebih terhadap flu ini.

Demikian pula halnya dengan pandemi Covid-19, indikasi yang ada di berbagai negara menunjukkan bahwa pandemi ini akan berakhir lebih dahulu secara sosial ketimbang berakhir secara medis. Banyak negara berangsur mulai membuka diri dan melakukan relaksasi dari kebijakan *social distancing* dan karantina yang dilakukan. Frustrasi dan kelelahan terhadap ketakutan terhadap virus ini secara sosial agaknya telah mencapai puncaknya, sehingga impuls untuk kembali melakukan aktivitas secara normal sebagai makhluk sosial dan ekonomi sulit untuk ditolak. Termasuk di Indonesia, pelanggaran atau lebih tepatnya mungkin pelanggaran terhadap aturan *social distancing* menjadi suatu hal yang jamak terlihat dalam beberapa waktu terakhir.

Tentu masih menjadi perdebatan yang hangat antar pakar kesehatan publik yang menolak dilakukannya pelanggaran dan beberapa elemen di masyarakat, terutama dari kalangan pengusaha, yang mengadvokasi segera diakhirinya pembatasan sosial yang ada. Satu perdebatan yang rumit, di mana kedua belah pihak memiliki alasan yang sama-sama kuat. Perdebatan ini tentu hanya bisa diakhiri dengan keputusan tegas yang diambil oleh pengampu kebijakan secara nasional. Dan dalam hal ini, berkaca juga dari sejarah yang ada, argumen sosial dan ekonomi hampir setiap saat dimenangkan dalam sebuah perdebatan kebijakan publik.



Gambar 6. Fasilitas Hadapi Covid-19 di Indonesia
Sumber: Kompas (2020)

⁹ Kolata (2020), How Pandemics End, New York Times, 10 May 2020.

Sehingga, hal yang perlu disiapkan untuk meminimalisir risiko dari diakhirinya pandemi ini secara sosial tidak bisa tidak adalah penguatan kapasitas kesehatan publik dalam melakukan 3t (*testing, tracing* dan *treatment*) serta memastikan ketersediaan tenaga medis secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia masih memiliki banyak keterbatasan. Sebagai contoh, ketersediaan rumah sakit dan ventilator untuk menangani penderita Covid-19 relatif masih sangat sedikit dibanding kebutuhan yang ada. Keberadaannya pun lebih banyak berpusat di Jawa, meski saat ini pusat pandemi Covid-19 sudah menyebar di banyak daerah lain di luar Jawa¹⁰.

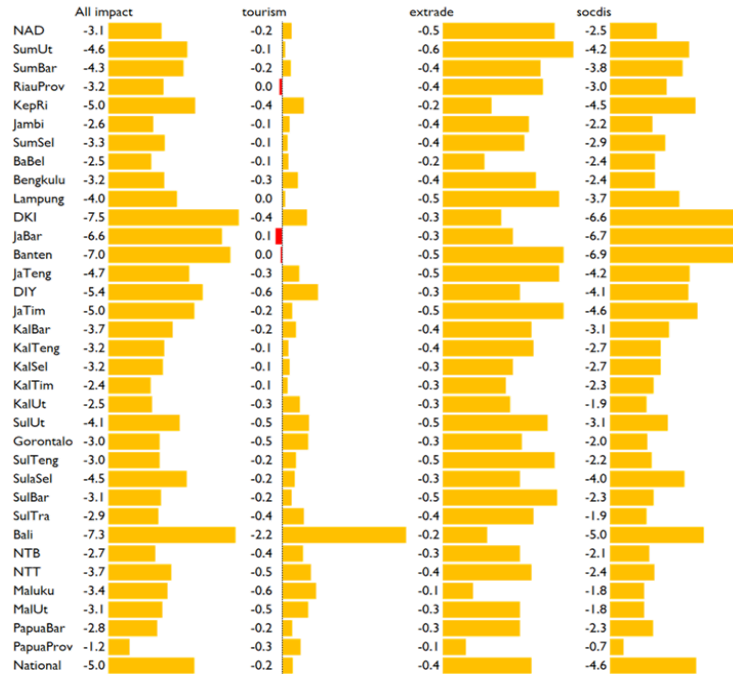
Untuk melihat sejauh mana dampak dari pandemi Covid-19 ini di berbagai daerah di Indonesia, bagian selanjutnya dari artikel ini akan mengulas heterogenitas dampak dan kesiapan melakukan pemulihan dan penguatan ekonomi di beragam daerah yang ada di Indonesia.

IV. Heterogenitas Wilayah dari Krisis Pandemi Covid-19

Secara umum, krisis akibat pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Akan tetapi, sebagaimana halnya secara sektoral, terdapat juga heterogenitas dari dampak yang ada pada perekonomian setiap provinsi.

Satu simulasi yang dilakukan oleh Arief Anshory Yusuf (2020) menunjukkan nyatanya gradasi ini. Dengan mengasumsikan terdapat tiga transmisi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, yakni melalui perubahan pada tingkat perdagangan eksternal provinsi, perubahan aktivitas pariwisata dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (*social-distancing*), Arief menunjukkan terdapat penurunan tingkat pertumbuhan sebesar rata-rata 5,0% dari 2019 secara nasional. Dengan kata lain, angka pertumbuhan ekonomi pada 2020 diramal akan turun menjadi hanya nol persen dari basis 5,02% pertumbuhan pada 2019. Simulasi yang sama menunjukkan gradasi di berbagai provinsi. Penurunan terbesar diperkirakan akan terjadi pada DKI, yang diperkirakan PDRB-nya (Produk Domestik Regional Bruto) akan merosot hingga negatif 7.5%. Atau dengan basis pertumbuhan pada 2019 sebesar 5,9%, ekonomi DKI diperkirakan akan tumbuh negatif 1.6% pada 2020. Sementara dampak terlemah akan terjadi di provinsi Papua, yang perekonomiannya hanya akan turun sebesar -1,2%, dari -15,72% pada 2019 menjadi -16.92% pada 2020.

¹⁰ Pusparris (2020), Hadapi Covid-19, Fasilitas Kesehatan Masih Terpusat di Jawa, Katadata.co.id, shorturl.at/iJOX3



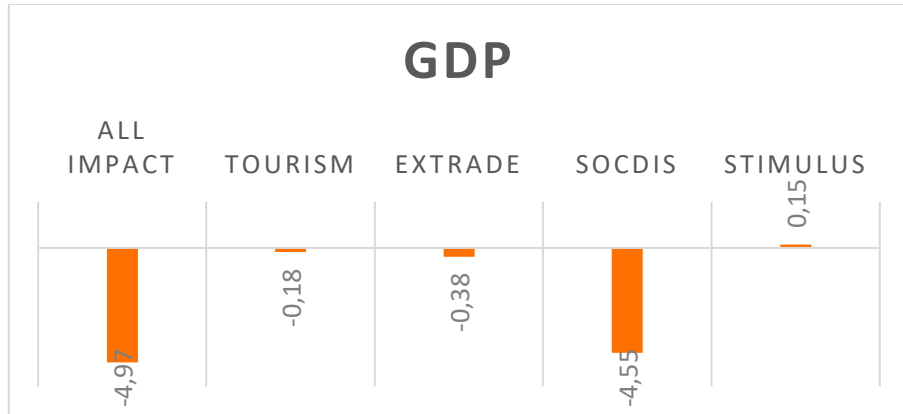
Gambar 7. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PDB Wilayah di Indonesia

Sumber: Yusuf (2020).

Simulasi tersebut juga menunjukkan akan terdapat kenaikan angka kemiskinan sebesar rata-rata 1,5% secara nasional, atau kenaikan hampir 3,9 juta penduduk miskin. Peningkatan terbesar akan dialami oleh provinsi Jawa Barat, yang penduduk miskinnya akan meningkat sebesar 1,9% atau 943 ribu orang, sementara kenaikan terendah akan terjadi di provinsi Kalimantan Utara, yang penduduk miskinnya naik 0.5% atau sekitar 3400 orang.

Kontributor utama dari penurunan hampir secara seragam perekonomian di berbagai wilayah di Indonesia adalah dilakukannya pembatasan sosial berskala besar secara serentak, yang memang secara faktual terjadi terutama dalam hal mobilitas penduduk untuk bekerja¹¹. Sementara, alokasi stimulus fiskal sebesar Rp.405 triliun (+/- 2.5% PDB) dalam bentuk bantuan sosial (Rp.110 triliun), anggaran kesehatan (Rp.75 triliun), insentif industri (Rp.70 triliun), dan pemulihan ekonomi (Rp.150 triliun) hanya berdampak minimal untuk menahan laju penurunan pertumbuhan, dengan kontribusinya pada peningkatan pertumbuhan hanya sebesar 0.15% (Gambar 8).

¹¹ Laporan mobilitas penduduk per provinsi, termasuk mobilitas menuju tempat kerja bisa dilihat pada Google Mobility Report yang bisa diakses di <https://www.google.com/covid19/mobility/>.



Gambar 8. Kontributor Utama Penurunan PDB Nasional akibat Covid-19
 Sumber: Yusuf (2020).

Tiga aspek menarik yang bisa kita petik dari kajian ini: Pertama, pandemi Covid-19 memiliki dampak ekonomi dan sosial terbesar pada provinsi yang memiliki banyak daerah urban yang padat penduduk. Dari sebaran yang terlihat pada Grafik 7 jelas terlihat bahwa pada proyeksi penurunan PDRB terbesar akan terjadi di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bali dan Sulawesi Selatan, yang merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki banyak daerah urban.

Kedua, kontributor utama penurunan PDRB pada berbagai provinsi yang ada di Indonesia adalah masifnya terjadi *social distancing* baik secara formal melalui kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) atau yang dilakukan secara informal, seperti mereka yang melakukan kerja dan belajar secara mandiri dari rumah, atau setengah terpaksa karena menganggur akibat terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau menutup usahanya.

Ketiga, penurunan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagian besar diakibatkan pembatasan sosial ini tidak bisa serta merta dipulihkan oleh guyuran stimulus fiskal, yang tentunya juga memiliki banyak keterbatasan baik dari segi sumber maupun instrumen yang bisa diambil. Suntikan stimulus sebesar Rp.405,1 triliun yang diberikan pemerintah memberikan dampak yang kurang signifikan untuk menahan laju penurunan pertumbuhan. Dari perkembangan terakhir, pemerintah berencana menambah stimulus fiskal pemulihan dari Rp.405,1 triliun menjadi Rp.677,2 triliun, dengan menambah alokasi bagi masing-masing pos yang ada serta tambahan pos baru bagi dana talangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dan BUMN (badan usaha milik negara). Akan tetapi, bila instrumen dan basis pendataan yang diterapkan masih sama dan cenderung tidak tepat sasaran sebagaimana yang terbukti di beberapa daerah, maka ketidakefektifan dari tambahan stimulus ini juga hampir akan terjadi lagi.

Alhasil, simalakama ketiga aspek ini adalah bahwa dengan mempertahankan kebijakan pembatasan soal akan melanjutkan kerusakan dan penderitaan ekonomi yang berkepanjangan, yang tidak bisa tertolong sekalipun dengan berbagai insentif dan stimulus yang diberikan. Sementara dengan tidak melakukan *social distancing* akan menimbulkan risiko terhadap kesehatan publik dan bertambahnya korban akibat virus Covid-19. Apalagi, sebagaimana dibahas sebelumnya, Indonesia belum bisa dikatakan telah mencapai puncak dari pandemi dan terdapat keterbatasan dalam melakukan *testing, tracing dan treating* pada masyarakat.

Solusi untuk simalakama ini adalah yang disebut dengan *new normal* atau hidup damai dengan Covid-19.

V. New Normal *aka* Hidup Damai dengan Covid-19

New normal atau hidup damai dengan Covid-19 sebagaimana yang dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo, adalah hidup dengan tetap melakukan berbagai aktivitas sosial-ekonomi, walau menerapkan beberapa protokol tindakan untuk meminimalisir risiko penularan. Ini artinya adalah perubahan pada rutinitas dan pola kebiasaan dalam berbagai aktivitas sosial, mulai dari cara bepergian, bekerja, belajar hingga belanja. Berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan *new normal* sudah juga mengeluarkan berbagai protokol terkait *new normal* ini¹². Seperti misalnya protokol tentang pendidikan, protokol untuk aktivitas industri serta protokol *new normal* untuk industri, pendidikan dan transportasi.

Sudah barang tentu, penerapan *new normal* memiliki risiko. Pengalaman beberapa negara seperti Korea Selatan yang sudah menerapkannya lebih dahulu pada 6 Mei 2020, menunjukkan bahwa relaksasi pembatasan sosial melalui *new normal* berpotensi menyebabkan munculnya gelombang kedua (*second wave*) penyebaran virus Covid-19. Satu hal yang telah terjadi di negara tersebut sehingga menyebabkan diberlakukannya lagi pembatasan sosial dan karantina hingga 14 Juni 2020¹³. Padahal negara ini termasuk memiliki disiplin tinggi dalam menerapkan protokol *new normal*, dengan fasilitas dan infrastruktur kesehatan untuk *testing, tracing dan treating* yang jauh lebih baik dari banyak negara lain.

Namun, tidak semua negara yang sudah menerapkan *new normal* kemudian gagal, atau mengalami gelombang kedua dari penyebaran virus Covid-19. Contoh kasus di Asia adalah Hong Kong yang sejauh ini bisa dikatakan telah sukses menerapkan *new normal* dan menghindari *second-wave* dari pandemi¹⁴. Begitu juga beberapa negara di Eropa seperti Austria dan Jerman yang juga mulai menerapkan *new normal* sejauh ini bisa dikatakan cukup berhasil dan belum terdapat laporan yang menunjukkan adanya lonjakan tambahan kasus penderita virus Covid-19 yang signifikan.

Benang merah kesuksesan berbagai negara ini pada intinya adalah tiga hal: dilakukannya *testing, tracing and treating* secara masif kepada penderita dan diduga penderita Covid-19, disiplin dalam menerapkan protokol di berbagai aktivitas, serta sedikit keberuntungan. Elemen terakhir mencerminkan adanya faktor di luar kendali yang bisa dilakukan seperti kelengahan dalam penerapan protokol di tengah banyaknya pengidap virus Covid-19 tanpa gejala yang bisa diidentifikasi.

Pertanyaan lebih lanjut kemudian apakah Indonesia memiliki semua ini? Satu hal yang lagi-lagi yang tak mudah dijawab. Dalam masa Pandemi segala hal adalah berisiko, namun tidak berarti kita harus berhenti karenanya.

¹² Misalnya, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e96ac2e2c65a/penting--ini-protokol-kesehatan-cegah-covid-19-di-kawasan-pabrik/> sebagai protokol untuk kawasan Industri yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Atau untuk institusi pendidikan yang dikeluarkan <http://ksp.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Protokol-Area-Institusi-Pendidikan-COVID-19.pdf> Kantor Staf Presiden.

¹³ Sebayang (2020), *Korsel Geger, Kala New Normal Buat Gelombang 2 COVID-19*, CNBC Indonesia, 29 May 2020.

¹⁴ Yeung (2020), *Two weeks of zero local infections: How Hong Kong contained its second wave of Covid-19*, CNN Asia, 5 May 2020.

VI. Penutup: Memetakan Jalan Menuju Penguatan Ekonomi

Dengan dimulainya fase *new normal* di Indonesia maka sebuah perencanaan di berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat seyogyanya sudah tersedia. Berbagai institusi pemerintah seperti Bappenas juga menyiapkan satu Protokol Produktif Aman sebagai protokol bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi di masa Pandemi, yang mengacu pada kriteria badan kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*).

Akan tetapi berbagai protokol ini saja tidak cukup. Karena kehadirannya bermaksud sebatas menerapkan tindakan preventif penyebaran virus Covid-19, yang pada akhirnya bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat, dengan mengatur pola aktivitas sosial ekonomi yang dilakukan. Berbagai protokol ini serupa dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yang seyogyanya dikoordinasikan lintas instansi serta antar pemerintah pusat, provinsi serta daerah. Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan secara horizontal dan vertikal, yang kemudian malah menyebabkan kebingungan masyarakat dan ketidakefektifan dalam penerapannya.

Contoh mutakhir di mana penerapan kebijakan *new normal* ini malah menjadi kontraproduktif adalah aturan terkait keharusan mendapatkan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) dalam beraktivitas di era *new normal*, yang ditetapkan beberapa pemerintah daerah. Dalam praktiknya, aturan ini menjadi beban yang memberatkan masyarakat, karena selain pengurusannya yang berbelit juga melibatkan biaya yang tidak kecil. Berlikunya jalan beraktivitas kembali di era *new normal* ini bagi pekerja antar daerah juga ditambah adanya aturan keharusan menjalani tes *polymerase chain reaction* (PCR) atau *rapid test* yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sehingga tidak mengherankan banyak yang kemudian membatalkan beraktivitas, termasuk maskapai penerbangan yang pun membatalkan penerbangan.

Lebih jauh, koordinasi kebijakan dan aturan lintas instansi horizontal dan vertikal juga harus dilakukan bukan hanya terbatas pada aturan yang terkait protokol *new normal*. Yang juga penting sesungguhnya adalah kebijakan dan aturan yang terkait anggaran dan penggunaan anggaran untuk stimulus bagi pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 sudah berikhtiar mengubah berbagai aturan terkait penganggaran, seperti pelonggaran batas maksimal defisit anggaran 3% selama masa penanganan Covid-19, relaksasi dalam penyesuaian besaran belanja wajib dan pergeseran anggaran antar unit organisasi (*fiscal switching*).

Namun, kebijakan pelonggaran terkait penganggaran ini juga sebaiknya juga ikut diiringi oleh dua hal lain: penyusunan prioritas penanganan yang tepat dan merefleksikan kebutuhan serta keberpihakan ke masyarakat kecil yang paling terdampak, serta penguatan basis data untuk penanganan dan melakukan intervensi sosial ekonomi langsung. Sebab tanpa prioritas yang jelas dan pengeksplisitan asumsi dan filosofi yang mendasarinya, kebijakan pelonggaran penganggaran dapat diibaratkan memberi cek kosong yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya tak langsung berdampak ke masyarakat banyak. Begitu juga dengan penguatan basis data harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan dan konflik sosial di akar rumput yang kemudian malah bisa menjadi bumerang bagi upaya penguatan.

Penyusunan prioritas ini harus disusun secara lengkap dan mampu berfungsi menjadi *roadmap* ke arah bukan hanya pemulihan tapi juga perbaikan dan penguatan perekonomian nasional. Sebab dibalik krisis yang ada, Pandemi Covid-19 ini juga sesungguhnya memberikan peluang bagi perbaikan dan penguatan ekonomi nasional. Idealitas tentang perekonomian nasional ke depan seperti misalnya keharusan terdapatnya jaring pengaman sosial yang kuat dan lengkap, fasilitas kesehatan publik yang baik, infrastruktur digital yang memadai serta kesadaran akan pentingnya *low carbon* berikut perhatian lebih pada lingkungan harus dimasukkan ke dalam *roadmap* penguatan ini.

Last but not least, penyusunan *roadmap* mutlak memperhatikan aspek kewilayahan. Perhatian kepada kekhasan wilayah adalah keharusan mengingat terdapat heterogenitas dampak dari Pandemi Covid-19 ini, serta *comparative advantage* yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Jangan kemudian terkesan dalam penyusunan prioritas dan *roadmap* terdapat penganakemasan sektor-sektor tertentu, seperti perhatian yang terkesan agak berlebih kepada sektor pariwisata, yang bisa diartikan mengutamakan daerah-daerah tertentu.

Daftar Pustaka

- Balakrishnan, V. (2020) *The impact of COVID-19 on Singapore, our region, and the world*/Interviewer: CNBC. CNBC Asia Exclusive, CNBC, Singapore.
- BPS (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020*. Jakarta 2020.
- Cheung, H. (2020). *Coronavirus: US unemployment claims hit 33.3 million amid virus*. BBC News Services.
- Christensen, J. (2020, 3 June 2020). *US should have a 'couple hundred million' doses of a Covid-19 vaccine by the start of 2021, Fauci says*. CNN. Retrieved from shorturl.at/dgikW
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)* [Press release]
- Kolata, G. (2020, 10 May 2020). *How Pandemics End*. *New York Times*. Retrieved from shorturl.at/eFJNS.
- Litbang Kompas (2020). *Fasilitas Kesehatan Hadapi Covid-19 Indonesia*. OurWorldinData.org. (2020). *CoronaVirus*. shorturl.at/rtCMW
- Pusparisa, Y. (2020). *Hadapi Covid-19, Fasilitas Kesehatan Masih Terpusat di Jawa*. from katadata.co.id shorturl.at/iJOX3.
- Sebayang, R. (2020, 29 May 2020). *Korsel Geger, Kala New Normal Buat Gelombang 2 COVID-19*. CNBC Indonesia.
- Warjiyo, P. (2020). *Koordinasi Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional* [Press release]. Bank Indonesia.
- Yeung, J. (2020, 5 May 2020). *Two weeks of zero local infections: How Hong Kong contained its second wave of Covid-19*. CNN.
- Yusuf, A. A. (2020). *Not all "Covid" are created equal: Heterogenitas daerah dampak sosial-ekonomi pandemi Covid-19*. Presentasi pada focus group discussion Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pembangunan daerah. Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. BAPPENAS, 14 Mei 2020